



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 929/III/X/2016

**Menjaga Bali Sebagai
Harta Karun Indonesia**

**Lembaga Penyelenggara Haji
Mendesak Dibentuk**

**Penanaman Moral Pancasila
Harus Dimulai Sejak Dini**





Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan cinderamata kepada Pemda Bali dalam acara Press Gathering Wartawan DPR RI

Menjaga Bali Sebagai Harta Karun Indonesia

Acara *Press Gathering* Setjen DPR RI dan Wartawan Koordinatoriat DPR RI berjalan meriah dan lancar. Acara kali ini mengangkat tema "Melindungi Bali, Sebagai Destinasi Wisata Berkearifan Lokal" dibuka oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin. Acara ini dihadiri lebih dari 100 wartawan.

Dalam sambutannya, politisi yang akrab dipanggil Akom itu mengatakan Bali adalah harta karun Indonesia yang harus dijaga bersama, kearifan lokal, seni dan budaya harus dilestarikan serta alam yang ada di pulau dewata ini harus dirawat juga.

"Bali saya kira harta karun Indonesia di bidang wisata, sekarang juga sudah mulai berkembang (pariwisata) di beberapa daerah lain, tetapi Bali akan terus menjadi destinasi tersendiri bagi wisata Indonesia dan dunia," ujar Akom, saat memberi sambutan sekaligus membuka acara diskusi, di ruang pertemuan Hotel Ramada Bintang, Kuta, Bali, Jumat (7/10) malam.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany juga menyampaikan, setelah dibuka acara oleh Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan diskusi bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus Asisten II Pemprov Bali Ketut Wija.

"Mohon berkenan Bapak Sutan Adil Hendra sekaligus

Bapak Ketut menyampaikan bagaimana permasalahan yang ada di Bali sebagai destinasi wisata yang berkearifan lokal, apa upaya untuk melindunginya, dan tentu dari perspektif kebijakan," ujar Win, sapaan akrab Sekjen DPR RI saat memberi sambutan.

Saat diskusi Sutan Adil menyampaikan tradisi serta adat istiadat yang ada di Bali adalah hiburan yang membuat turis menjadi tidak bosan untuk berkunjung ke Bali lebih dari satu kali, selain alamnya yang menjadi daya tarik. "Destinasi kearifan lokal Bali ini kata kunci dalam mengembangkan pariwisata," ujar politisi F-Gerindra itu.

Dia menekankan kepada pemangku kepentingan wisata yang ada di Bali agar mempertahankan tradisi, kebudayaan dan adat istiadat yang ada di tengah-tengah masyarakat Bali.

Sementara itu Ketut Wija menanggapi pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa tradisi yang ada di Bali sudah disadari memiliki keunikan. Meskipun banyak turis asing masuk pulau dewata sehingga terjadi akulturasi budaya, namun tradisi asli tetap dijaga dengan menerima yang baik dan menghindari yang buruk. ■

Jelang Pilkada, Pimpinan DPR RI Ingatkan Jaga Persatuan dan Kesatuan

Jelang Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan digelar pada tahun 2017, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengimbau agar seluruh komponen dan elemen bangsa ini, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Meski tak dipungkiri, tentunya akan ada perbedaan pandangan dalam memilih calon kepala daerah masing-masing.

Selain itu, Taufik juga mengingatkan agar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seyogyanya dijadikan acuan oleh seluruh *stakeholder* atau pihak-pihak yang berkaitan dengan perhelatan akbar demokrasi rakyat tersebut, agar ke depan tidak menimbulkan permasalahan.

"Sebagai Pimpinan DPR RI, saya mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang melarang seluruh menteri, pejabat atau pimpinan atau petinggi lembaga negara termasuk non pemerintah untuk kampanye Pilkada 2017," pesan Taufik dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (10/10).

Akan tetapi 'warning' ini seharusnya, tambah Taufik bukan hanya sekedar peringatan atau pelarangan semata, harus ada sanksi yang tepat bagi siapapun yang melanggarnya.

"Saya mengharapkan pemerintah 'melegalkan' larangan tersebut, seperti dengan mengeluarkan Kepres atau Perpres yang isinya melarang seluruh menteri, pejabat atau pimpinan atau petinggi lembaga negara termasuk non pemerintah untuk kampanye Pilkada 2017, serta



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut," tegas politisi PAN.

Dengan adanya Perpres atau Keppres itu, sambung Taufik, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi menteri, pejabat atau pimpinan atau petinggi lembaga negara termasuk non pemerintah yang tentunya memiliki pengaruh dan instrumen kelembagaan karena jabatannya tersebut, untuk berani ikut kampanye Pilkada.

"Nilai Pilkada Serentak sebagai perhelatan akbar demokrasi rakyat Indonesia tentunya akan tercoreng

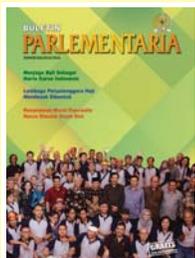
serta tidak lagi murni dan otomatis terdegradasi dimata publik, jika menteri, pejabat atau pimpinan atau petinggi lembaga negara termasuk non pemerintahan, tetap nekat ikut kampanye," tegas Taufik.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu juga mengimbau kepada semua rakyat Indonesia, untuk menggunakan hak suaranya dalam Pilkada nanti. Ia berharap pemilih untuk tidak golput, dan memilih calon kepala daerah yang benar-benar dapat mengemban amanat rakyat. Selain itu, calon kepala daerah itu memiliki program-program yang mengedepankan kepentingan rakyat dan mampu mengembangkan daerah yang akan mereka pimpin ke depan.

"Jangan terpengaruh bujuk rayu apapun, apalagi sampai menjual suara kepada calon kepala daerah yang bermain *money politic*. Karena saya pastikan calon kepala daerah yang menggunakan *money politic*, tidak akan mengimplementasikan suara rakyat dalam setiap keputusan atau kebijakan yang akan mereka lakukan jika terpilih menjadi kepala daerah," pesan Taufik. ■

(g) Foto: Anandijk

BULETIN
PARLEMENTARIA



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon Ifan, Siti Rondiyah, Oji **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) [ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN]

Ketua DPR RI Sambut Usulan RUU Madrasah dan Pesantren dari FKB

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik usulan F-PKB DPR RI atas RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren. Kehadiran negara atas dua lembaga pendidikan tersebut selama ini dinilai minim.

Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI, menyampaikan hal tersebut di Acara HUT F-PKB DPR RI ke-17, Rabu (12/10), di Gedung Nusantara II DPR RI. "Saya mendukung penuh RUU Madrasah dan Pesantren yang diusulkan F-PKB," ucapnya, seraya disambut tepuk tangan para tamu yang hadir.

Tampak hadir dua Wakil Ketua DPR RI, masing-masing Agus Hermanto dan Fahri Hamzah. Hadir pula Ketua PKB Muhaimin Iskandar, Ketua F-PKB DPR RI Ida Fauziah, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, para anggota F-PKB, dan anggota fraksi-



Ketua DPR RI Ade Komarudin

fraksi lainnya di DPR RI. Dalam sambutannya, Akom mengatakan, usulan F-PKB sangat bagus agar publik juga memberi perhatian lebih terhadap eksistensi madrasah dan pesantren.

Pada bagian lain, Akom juga menyampaikan bahwa partisipasi publik dalam bidang politik menurun sejak reformasi bergulir. Namun, citra DPR RI mulai meningkat dari hasil jajak pendapat Kompas beberapa waktu lalu. "Kita harus kerja keras untuk tingkatkan partisipasi publik dalam politik sekaligus kita pertahankan citra DPR RI yang sudah membaik ini," seru Akom.

Saat yang sama, Akom juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan F-PKB di DPR RI. Fraksi kaum nahdyyin ini dinilainya paling rajin. Setiap kali rapat Paripurna DPR RI, kursi F-PKB selalu penuh terisi. ■

(mb), Foto: Anandijk

Fadli Zon Berikan Pendidikan Politik untuk Mahasiswa

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon menjadi pembicara dalam acara Diskusi dan Audiensi Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia. Di acara tersebut Fadli menjelaskan tentang tanggung jawab para politisi dalam memberikan nilai pendidikan politik yang luhur serta membumikan demokrasi yang substansial.

Dia menjelaskan bahwa, idealnya politik adalah wadah yang beradab dan damai untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah kekuasaan didapat maka *power* yang diperoleh digunakan untuk semaksimal mungkin menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

"Kalau kita melihat politik adalah wadah yang beradab yang damai untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan dan diatur melalui konstitusi," ujar Fadli di *Operational*

Room, Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (11/10).

Dia mengatakan, karena banyak politisi yang menyimpang dari tujuan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan, sehingga mengakibatkan kata politik berkonotasi buruk. Menurutnya kaum akademis harus bisa membedakan antara perilaku menyimpang para politisi dengan politik yang bebas nilai.

"Banyak yang beranggapan politik itu kotor dan politisi juga kotor. Ini yang menjadikan orang sinis dengan

politik, tetapi pada ujungnya pasti membutuhkan politik," ujar Fadli.

Pernyataan tersebut sangat beralasan karena orang yang tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik, secara tidak langsung akan kehilangan haknya. Segala macam biaya hidup, dari harga pangan dari yang paling kecil seperti kacang, sampai dengan kebutuhan papan, harga rumah semuanya ditentukan melalui proses politik.

Seorang pemimpin dipilih melalui proses politik, jika yang terpilih



Suasana pertemuan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan Mahasiswa FISIP UI

adalah pemimpin yang tak memiliki kemampuan mengelola negara maka konsekuensinya kesejahteraan masyarakat terabaikan.

"Semua aturan diputuskan lewat proses politik. Bahkan politik bisa mengubah keadaan melalui satu lembar kertas," tandas Fadli.

Dia mengharap-kan para pembelajar ilmu politik dapat berkontribusi bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Karena jika dinamika politik dimasuki orang

yang tidak mengerti nilai luhur politik dan tidak memiliki kemampuan dalam memimpin, akibatnya adalah kerusakan negara.

Oleh sebab itu, para kaum akademis seperti mahasiswa berkewajiban juga dalam memberikan penyadaran politik. "Kita juga harus memberikan satu penyadaran, karena segala kebijakan ditentukan melalui proses politik, tapi jangan kelamaan tidak sadarnya," ujar Fadli. ■

(eko), Foto: Antrif/jk

Pengamanan DPR RI Perlu Dievaluasi

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengingatkan, soal pengamanan DPR RI yang masih bolong-bolong. Di Komplek Parlemen ini meski sudah ada Pamdal, diperiksa identitas dan ada alat deteksi supaya tidak ada bom tapi masih perlu diperketat. "Pengamanan ini juga perlu dievaluasi. Sudah ada rencana tetapi belum konsisten dijalankan," ungkap Akom sapaan akrab Ketua DPR RI saat memberikan sambutan pada acara *Press Gathering* di Bali, Jumat (7/10) malam lalu.

Soal pengamanan ini pula yang dibahas dalam pertemuan Forum Meksiko, Indonesia, Korea Turki dan Australia (MIKTA) di Tasmania, Kamis (6/10). "Ini saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban, karena jangan dianggap menghamburkan uang negara. Ini pula perjalanan kedua setelah sebelumnya memimpin Tim Pengawasan Haji ke Arab Saudi," ujar Akom yang menghadiri forum kerja sama kаланган eksekutif dan legislatif lima negara tersebut.

Ketua DPR RI yang memimpin Sidang dengan topik Keterbukaan dan Akuntabilitas Parlemen dan *Security* Parlemen menyinggung bahwa pengamanan di parlemen berjalan sangat tertib. Dimana-mana sangat tertib, semua dikelola dengan

baik termasuk keterbukaan pembicaraan disatukan dengan *security*. Di Australia dijaga betul jangan ada terorisme.

"Jangan sampai di parlemen kemudian di bom. Menurut saya, benar juga. DPR RI blong banget bisa saja ada yang mengalihkan tidak hanya bom supermarket tetapi parlemen," tandas Akom dengan menambahkan bahwa pengamanannya berlapis-lapis bekerja sama dengan tentara dan polisi.

Terkait dengan Keterbukaan Parlemen di Australia sama dengan DPR

RI, ada *twitter*, *youtube*, *facebook* dan *website*. Kedepannya dia minta dikelola dengan baik termasuk TV Parlemen. Soal keterbukaan ini yang menarik, di DPRD Tasmania, ruang balkon ditutup kaca. Semua proses pembahasan orang luar harus tahu meski tidak mengabaikan faktor keamanan sebab bisa saja orang iseng lempar barang ke ruang rapat. "Kaya balkon rapat paripurna atau komisi ditutup kaca, tapi proses pembahasan tahu semua melalui layar TV."

Sedangkan soal anggaran, Akom mengharapkan DPR RI mulai menerapkan *E-Budgeting* sehingga kian akuntabel. Banyak daerah yang sudah mulai, kenapa tidak DPR RI juga melakukannya. "Kita lakukan *E-Budgeting* untuk wujudkan Pemerintah yang bersih (*E-Governance*)."

Ketua DPR RI menyatakan sudah bicara dengan Menpan membuat semacam *MoU* melakukan kerjasama dengan Kesetjenen, untuk menata DPR RI tidakhanya memaksimalkan kinerja para anggota DPR RI, tetapi juga kesetjenen sebagai *supporting system*. ■

(mp) Foto: Jakarta

Press Gathering Tingkatkan Keakraban dengan Wartawan

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, *Press Gathering* Wartawan Koordinatoriat DPR RI merupakan acara yang menarik, karena bisa meningkatkan keakraban antara DPR RI dengan wartawan. Sehingga silaturahmi antar keduanya memang perlu dilakukan.



Pimpinan DPR RI didampingi Wakil Ketua Komisi VII dan X serta Sekjen DPR RI dan Kepala DPD

“ Acara *Press Gathering* ini sangat menarik, karena semakin ada keakraban diantara pers dan DPR RI. Paling tidak Pimpinan DPR RI dan AKD makin akrab lagi dengan wartawan,” kata Agus, saat memberi sambutan pada acara *Press Gathering* Wartawan Koordinatoriat DPR RI, di Hotel Ramada Bintang, Kuta, Bali, Jumat (7/10) malam.

Acara yang mengambil tema 'Melindungi Bali, Sebagai Destinasi Wisata Berkearifan Lokal' ini dibuka oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad, Asisten Gubernur II Provinsi Bali, I Ketut Wija, pejabat di lingkungan DPR RI, dan lebih dari 100 wartawan.

Agus berharap, berita tentang DPR RI semakin positif dan bagus. Namun, "Sekaligus negatif tidak apa-apa, asal (DPR RI) jangan *di-bully* saja. Saya yakin teman-teman (wartawan) tidak ada yang *bully* saya," kata politisi F-PD itu, yang disambut tawa seluruh wartawan yang hadir.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu kembali menekankan pentingnya *press gathering* ini. "Jadi memang saya sangat suka dengan acara ini. Paling tidak komunikasi saya dengan teman-teman wartawan itu sangat perlu. Sekali lagi sangat perlu," ungkap Pimpinan DPR RI

dari pemerintah daerah. Terutama hal-hal terkait bidang komisi yang dipimpinnya.

"Banyak sekali input yang kita dapat di daerah. Misalnya tema kali ini terkait pariwisata kearifan lokal. Kita ketahui, salah satu kunci keberhasilan pariwisata Bali adalah menjaga kearifan lokal," kata Sutan.

Menurutnya, Bali mempunyai daya tarik budaya dan adat istiadat, yang menarik bagi wisatawan, bukan hanya wisatawan domestik, tapi juga mancanegara. Ia berharap, destinasi pariwisata lain pun dapat menjaga kearifan lokalnya. Misalnya Danau Toba, Tanjung Lesung, Wakatobi, Bangka Belitung, dan lain sebagainya.

"Namun, persoalannya yang harus dievaluasi adalah minimnya infrastruktur. Akses sangat memprihatinkan," tegas politisi asal dapil Jambi itu.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Gubernur II Provinsi Bali, I Ketut Wija mengatakan, pihaknya merasa senang dengan *press gathering* DPR RI ini. Menurutnya, hal ini merupakan momen untuk menyampaikan berbagai potensi Bali.

Korinbang ini.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. Politisi F-Gerindra itu menekankan, dengan adanya acara *press gathering*, ia mengaku mendapat banyak masukan dari wartawan, dan juga

"Saya sangat senang dengan kegiatan DPR RI ini, apalagi yang diajak adalah para wartawan dari berbagai media, sehingga ini kan corong atau *speaker* kami untuk menyampaikan informasi Bali," jelas Ketut.

Pejabat Pemprov Bali yang juga baru dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bali itu menekankan, wisatawan domestik itu juga sangat besar manfaatnya untuk pertumbuhan ekonomi Bali.

"Jadi kalau ada wartawan datang ke Bali, semua orang dari Sabang sampai Merauke membaca berita tentang pariwisata Bali, tentu juga dari sekian persen pasti ada yang ingin datang ke Bali," kata Ketut, sembari merekomendasikan untuk mengunjungi daerah lain di Bali, selain Kuta atau Denpasar.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyas Titi Swasanany melaporkan, *press gathering* kali ini merupakan acara yang ke-19 kalinya sejak tahun 2009. Sebelum tahun 2015, *press gathering* hanya digelar sebanyak 2 kali dalam setahun. Namun setelah itu menjadi 4 kali dalam setahun.

"Sejak 2015, dalam acara juga ada dialog yang diisi oleh kalangan DPR RI dan pejabat setempat. Selain silaturahmi juga ada penambahan wawasan tentang perkembangan pembangunan di daerah, dan mempromosikan wilayah yang menjadi tuan rumah," jelas Win, panggilan akrab Winantuningtyas. ■

(Gf.rmp.ann), Foto: Arief/jik

Fadli Zon: Hukuman Mati Masih Dibutuhkan

Kontroversi hukuman mati yang masih diberlakukan di Indonesia, terus menjadi polemik hangat. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melihat bahwa hukuman mati masih dibutuhkan dalam hukum nasional.

Fadli menegaskan hal tersebut kepada pers, usai menerima Delegasi HIMA Persis di ruang kerjanya, Senin (10/10). KUHP Indonesia, kata Fadli, masih mengenal bentuk hukuman mati tersebut. Bahkan, di sejumlah negara, hukuman mati masih banyak diberlakukan. Namun, Fadli segera menambahkan, bila ada kajian terbaru

Paripurna DPR RI Setujui RUU Jabatan Hakim Jadi RUU Usul Inisiatif DPR RI

Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang jabatan Hakim menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna DPR RI, Rabu (12/10) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.

“ Kami menanyakan kepada seluruh sidang dewan yang kami hormati, apakah RUU tentang Jabatan Hakim ini dapat disetujui dan disahkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI?” tanya Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto yang memimpin sidang kali itu kepada seluruh para Anggota Dewan yang hadir.

Jawaban "setuju" dari anggota sidang disusul ketukan Palu sidang dari pimpinan DPR RI menandai disahkannya RUU tersebut menjadi RUU Inisiatif DPR RI untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

RUU Jabatan Hakim ini merupakan Hak inisiatif DPR RI yang diajukan oleh Komisi III DPR RI pada September tahun lalu. Setelah melalui berbagai proses diskusi dan rangkaian penyusunan, akhirnya Naskah Akademis (NA) dan draf RUU tentang Jabatan Hakim disampaikan kepada Badan legislasi (Baleg) DPR RI untuk dilakukan pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsep.

Hasil kajian pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsep RUU



Pimpinan DPR RI menerima dokumen pandangan Fraksi mengenai RUU Jabatan Hakim

Jabatan Hakim telah diterima sepenuhnya oleh Komisi III. Beberapa hal yang krusial diatur dalam pembentukan RUU tentang jabatan hakim pasca harmonisasi oleh Baleg DPR RI diantaranya adalah menambahkan hakim militer di dalam ruang lingkup jabatan hakim sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4.

Mengubah pengaturan pendelegasian mengenai kode etik dan pedoman perilaku

hakim dari yang semula diatur oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, menjadi diatur dalam peraturan pemerintah (tercantum dalam pasal 10).

Hal krusial lainnya adalah menambahkan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang akan bersama-sama dengan Mahkamah Agung melakukan uji kompetensi dan kelayakan dan menentukan lulus atau

tidaknya calon hakim tinggi (pasal 27 ayat 2 huruf b). Dalam RUU ini juga menambahkan KY untuk bersama-sama dengan MA membentuk tim mutasi Hakim Pertama (pasal 41 ayat 3). RUU ini juga menambahkan KY untuk bersama-sama dengan MA melakukan pembinaan Hakim tinggi (Pasal 42 ayat 2). Serta sejumlah hal krusial lainnya yang diatur di pasal-pasal dalam RUU ini. ■

(ayul/pacrumi/hr)



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terima Delegasi HIMA Persis

tentang penghapusan hukuman mati, pemerintah perlu menyambutnya untuk dikaji kembali.

Komentar Fadli ini merespon

desakan Komnas HAM dan pegiat kemanusiaan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan moratorium hukuman mati. Bila hukuman mati ingin dihilangkan, butuh revisi UU KUHP yang cukup memakan waktu. Ada banyak proses politik yang harus dilalui.

"UU yang ada sekarang adalah UU yang sudah lama berlaku dan hukuman mati ada di

situ. Saya melihat ada plus minusnya. Hukuman mati itu untuk efek jera terutama dalam kasus kejahatan luar biasa seperti narkoba dan pembunuhan.

Menurut saya, kita masih membutuhkan. Namun, kalau ada pemikiran baru yang berkembang terutama di Eropa bahwa hukuman mati tidak menjadi solusi, kita harus kaji secara mendalam," imbuh Fadli.

Kesepakatan semua pihak tentang penghilangan hukuman mati perlu diambil. Dan mau tidak mau DPR RI dan Pemerintah harus merevisi hukuman mati yang tercantum dalam beberapa UU. "Perlu ada perubahan UU. Dan itu ada proses politik yang cukup lama. Dinamika politiknya akan tinggi. Sebagian masih berpendapat, hukuman mati itu masih perlu dan sebagian lagi berpendapat tidak perlu," tutup Fadli. ■

(mb) Foto: Andri/jk

DPR RI Setujui Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Catatan

Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan pembahasan Undang-Undang Tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berlangsung dinamis. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, di Ruang Sidang Paripurna Nusantara II, Gedung DPR RI, Rabu (12/10).

Meskipun pada akhirnya Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Undang-Undang Perlindungan Anak dengan catatan, namun dalam rapat, saat ditanyai tentang persetujuan anggota terhadap UU tersebut, sempat diwarnai interupsi dari dua perwakilan Fraksi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dua fraksi tersebut menyatakan tidak setuju karena memandang undang-undang yang akan disahkan ini belum komprehensif, masih membutuhkan penyempurnaan dari berbagai macam segi. Namun persetujuan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan catatan bisa menemukan titik temu setelah rapat diskors beberapa menit untuk melakukan lobi dan negosiasi.

"Sekali lagi menanyakan kepada bapak ibu Anggota Dewan yang terhormat apakah RUU Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23



Pimpinan DPR RI menerima dokumen mengenai pandangan pemerintah tentang Perpu Perlindungan Anak

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat disetujui dengan catatan yang telah disampaikan kedua fraksi tersebut?" tanya Agus, para anggota dewan menjawab "setuju" pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda pengesahan, dengan diiringi tepuk tangan dari para anggota dewan.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakarya

menyampaikan bahwa setelah disahkannya UU Perlindungan Anak, dia tetap meminta ada revisi agar bisa lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif. Meskipun menyatakan sikap yang berbeda namun tetap menghormati keputusan.

"Kami dari Fraksi Gerindra menghormati keputusan tersebut, tetapi berdasarkan prinsip, kami harapkan nanti ditambahkan sebagai catatan. Bahwa setelah disahkannya tetap ada revisi," ujar Rahayu.

Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia menilai undang-undang tersebut masih kurang jelas, perlindungan kepada korban kekerasan anak masih ada cela, perhatian kepada korban pun masih minim. Dia menilai undang-undang tersebut lebih banyak mengatur tentang hukuman kepada pelaku.

"Kami melihat masih ada beberapa substansi yang masih harus kita perdebatkan dan masih memerlukan penjelasan," ungkap Ledia. Setelah disetujuinya Undang-Undang Perlindungan Anak dengan catatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menyampaikan terimakasih kepada DPR RI. Dia mengatakan catatan yang diberikan DPR RI akan ditindaklanjuti. "Adapun catatan yang diberikan DPR RI akan kami tindaklanjuti," tanggapnya. ■

(foto, Foto: Juyadi/jk)

Komisi VIII Usulkan Dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji

Komisi VIII DPR RI mengusulkan banyaknya permasalahan dalam revisi RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) maka dipandang perlu adanya sebuah badan khusus yang mengurus keuangan haji yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan regulasi yang lebih baik.

“Selain untuk merevisi UU No. 13 tahun 2008, kami juga berupaya mengusulkan dalam RUU PIHU yang sedang dibahas, adanya sebuah badan khusus yang mengurus keuangan haji yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan

regulasi yang lebih baik sebagai regulator yang bisa bermanfaat bagi masyarakat," ujar Anggota Panja Haji Komisi VIII DPR RI Kuswiyanto dari fraksi PAN.

Politisi PAN mengatakan, Badan ini diberikan tugas untuk mengelola segala teknis penyelenggaraan serta pengelolaan

keuangan. Aktivitas dan operasionalisasinya juga terpisah dari Kementerian Agama RI.

Kehadiran BPKH ini diharapkan lebih efektif dibandingkan sistem keuangan yang selama ini dilaksanakan oleh BPIH. Dengan badan ini pula, segala kerancuan yang ada bisa segera dibenahi.

"Bukankah ini menjadi rancu, misalnya yang berangkat haji tahun ini (2015) adalah haji yang periode mendaftarkan diri 2008-2010, sedangkan penyelenggaraan haji juga menggunakan dana dari jamaah yang mendaftar tahun 2011-2015," tuturnya.

Karena itu kerancuan dalam pengelolaan dana haji tersebut akan menjadi prioritas bagi BPKH sebagai

DPR RI Dukung Empat Sukses Asian Games XVIII

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games XVIII tahun 2018 oleh *Olympic Council of Asia* (OCA) pada tanggal 20 September 2014 di Incheon. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games XVIII tahun 2018 (AG XVIII) harus dimaknai sebagai sebuah momentum peningkatan prestasi olahraga khususnya, dan prestasi lain pada umumnya.



Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya

Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya saat membacakan laporan hasil kinerja Panitia Kerja Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 Komisi X DPR RI (Panja PAG XVIII) di depan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).

"Namun, sejak penunjukan sebagai tuan rumah sampai dengan Panitia Kerja dibentuk, belum banyak yang dilakukan oleh Pemerintah dan para pemangku

kepentingan," tegas Riefky.

Riefky menjelaskan, beberapa persoalan yang muncul antara lain lambannya terbitnya payung hukum, revisi susunan Pangel INASGOC pasca kepengurusan KOI periode 2015-2019 terbentuk, persoalan *broadcasting fee* sebesar US\$ 30 juta, dan penggunaan dana sosialisasi persiapan AG XVIII secara serentak di beberapa kota di Indonesia yang dikhawatirkan ada potensi kerugian uang negara.

Selain itu, masih ada permasalahan revisi Rencana Induk AG XVIII, kesiapan *venue* pertandingan, wisma atlet, sarana dan prasarana latihan, pola penganggaran yang tidak memungkinkan pengalokasian tahun jamak untuk non fisik, belum ada hitungan yang baku kebutuhan pendanaan untuk memperoleh satu medali emas, dan persoalan lainnya seperti persoalan *mascot* Asian Games juga terlihat sangat mengkhawatirkan.

"Melihat persoalan-persoalan itu, pembentukan Panja PAG XVIII ini bertujuan untuk mendukung tercapainya "empat sukses AG XVIII" yaitu sukses administrasi penyelenggaraan, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi olahraga, dan sukses pemberdayaan ekonomi," kata Riefky.

Dari sisi Sukses Administrasi Penyelenggaraan, berdasar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), BPK RI menemukan tiga belas permasalahan berupa kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, administrasi pertanggungjawaban belanja, dan pemborosan keuangan negara yang secara total senilai Rp 67,63 miliar.

"Panja meminta Menpora RI atau Ketua Pangel INASGOC untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI itu, dan meminta Kemenpora RI atau Ketua Pangel INASGOC untuk tidak melibatkan kembali para pihak yang berpotensi moral *hazard* atau menimbulkan masalah atau melakukan wanprestasi sesuai hasil laporan pemeriksaan BPK RI," jelas Riefky.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, untuk Sukses Penyelenggaraan, kesiapan penyelenggaraan akan dapat terwujud melalui adanya payung hukum, integritas dan profesionalitas kepanitiaan, kesiapan infrastruktur, ketersediaan anggaran, keyakinan OCA dan negara-negara peserta atas kesiapan Indonesia sebagai penyelenggara AG XVIII.

"Panja PAG XVIII berpandangan bahwa payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan *event* olahraga nasional dan internasional belum komprehensif. Kesiapan waktu penyelesaian *venue* pertandingan, wisma atlet, sarana dan prasarana latihan terlihat sangat mengkhawatirkan," jelas Riefky.

Dalam hal Sukses Prestasi Olahraga, lanjut Riefky, Panja PAG XVIII berpandangan bahwa dukungan Pemerintah dalam hal ini Kemenpora RI, KOI, dan Satlak Prima terhadap atlet-atlet dan cabang-cabang olahraga prioritas yang berpotensi mendulang medali pada jenjang internasional belum didukung dengan *sport* dan *science-technology* yang berstandar olimpiade

Dan yang terakhir, Sukses Ekonomi harus dapat diraih oleh masyarakat atas penyelenggaraan AG XVIII, maka kesempatan Indonesia sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh semua pihak dalam mengembangkan beberapa sektor seperti sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Namun, "Momentum pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat belum tergambar secara komprehensif, yang sesungguhnya momentum tersebut merupakan sebuah kesempatan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai sektor seperti sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM untuk memperoleh manfaat ekonomi atas adanya penyelenggaraan AG XVIII," jelas politisi asal dapil Aceh itu.

Dalam laporan ini, Panja juga mengingatkan Pemerintah agar lebih serius menyelesaikan persoalan kesiapan *venues* berstandar internasional dalam kurun waktu satu tahun (12 bulan) sebelum penyelenggaraan AG XVIII. ■



Tim Kunspek Panja Haji Komisi VIII DPR RI mengunjungi UIN Malang

regulator untuk membenahinya. "Apakah itu dalam bentuk bank tabungan haji atau semacamnya," tegasnya. ■

(andri,mp), Foto: Andri/fk

(g), Foto: Krenafjk

KPI Diharapkan Berikan Pengawasan Ketat Pada TV Lokal

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menegaskan revisi UU Penyiaran yang kini sedang dibahas di Komisi I akan menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi dalam penyiaran dan mendorong KPI dalam memperkuat tugas pengawasan. Hal itu diungkapkan saat menerima audiensi DPRD Jateng pada Rabu, (12/10) di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita, dan ini juga untuk memastikan dalam revisi UU Penyiaran akan *cover* seluruh permasalahan yang terjadi dalam penyiaran dan memberikan payung yang cukup pada Kominformasi dan KPI dalam membuat peraturan-peraturannya,” ujar Dave.

“Dan saya harapkan KPI dapat memberikan pengawasan yang ketat pada TV lokal sehingga segala macam siaran yang disajikan ke pemirsa adalah yang berkualitas tinggi dan menjaga martabat bangsa,” tegas Dave.

Lanjut Dave, penguatan KPI adalah hal yang perlu karena seringkali ia mendapatkan laporan adanya data KPI yang hilang dalam kurun waktu 5 tahun. “Dan ada laporan yang mengatakan data yang



Anggota Komisi I DPR RI
Dave Akbarshah Fikarno

hilang selama 5 tahun, ini kan konyol lembaga negara bisa kehilangan data dalam rentang 5 tahun. Hasil pengawasan 5 tahun kan tidak hanya satu atau dua lembar,” terang Politisi Golkar tersebut.

Ia pun juga menegaskan tugas KPI yang semakin berat kedepannya, karena jumlah televisi semakin banyak dan adanya transformasi dari sistem analog ke digital. “Oleh karenanya di UU Penyiaran yang baru ini, TV akan bertransformasi dari sistem analog ke digital,” tutur Dave.

Dengan adanya jumlah TV yang semakin banyak maka akan semakin banyak pula yang perlu diawasi. “Semakin banyak TV maka akan semakin banyak yang diawasi. Yang namanya TV swasta pasti *profit oriented*. Nah, kalau gitu kan mereka akan mencari cara untuk meningkatkan *profit oriented*, seperti meningkatkan iklan. Jika begitu maka akan ada yang dikorbankan,” pungkas Dave. ■

(66) Foto: Jakatjk

Komisi IX Minta Dewas BPJS Ketenagakerjaan Jemput Bola

Komisi IX DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan guna meminta penjelasan terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewas terhadap kinerja direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Masih banyak permasalahan yang ada di BPJS Khususnya BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, aset dan berbagai permasalahan lainnya dari BPJS Ketenagakerjaan yang dialami selama ini.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX Elva Hartati yang meminta Dewas menjemput

bola atas masalah yang ada, jangan hanya menunggu ada penugasan.

“Kami melihat bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini bekerja belum optimal, satu contoh misalnya masalah rekening pekerja *outsourcing* yang tidak bertambah di BPJS Ketenagakerjaan padahal gaji mereka dipotong terus. Kami menginstruksikan Dewas agar mengawasi ini dan ada



Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati

pertanggungjawabannya,” ujarnya di gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (10/10).

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IX Irma Suryani yang meminta Dewas membereskan berbagai persoalan karyawan di daerah

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Narkoba Harus Diperkuat

Tingginya kasus peredaran dan kejahatan narkoba di Pulau Dewata menjadi salah satu perhatian khusus dari Tim Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Penegakan Hukum Sindikat Narkoba. Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo usai pertemuan informal dengan Kapolda Bali, Jajaran Kejaksaan, Kemenkumham, BNN, serta Pegiat masalah narkoba dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Teluk Benoa Denpasar, Minggu malam (9/10).

Menurut Bamsuet, demikian para rekan media biasa menyapanya, kedatangan Tim Panja Pengawasan dan Penegakan Hukum Sindikat Narkoba ingin memperoleh informasi seberapa besar jaringan pengedar narkoba di Bali karena banyaknya lokasi hiburan malam menjadi target operasi para pengedar barang haram tersebut.

"Apakah aparat kepolisian sudah *on the track* dalam hal pencegahan dan penindakan kasus narkoba di Bali, dari pihak Kejaksaan kenapa para terpidana narkoba seolah tidak jera, sudahkah hukuman penjahat narkoba memenuhi rasa keadilan masyarakat," ungkap Bamsuet menjawab pertanyaan media perihal maksud dan tujuan Tim Kunker Komisi III DPR RI kali ini.

Lebih lanjut Komisi III DPR RI juga ingin mendalami perihal dugaan keterlibatan petinggi aparat kepolisian yang *membackup*



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo

praktek jual-beli narkoba di Bali. Berdasarkan data BNN Provinsi Bali terbaru, terdapat 61.362 pengguna narkoba yang cukup mengkhawatirkan jika tidak dilakukan tindakan pencegahan secara serius dan melibatkan semua pihak.

"Silahkan para wartawan, rekan-rekan dari LSM dan masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan keterlibatan oknum

yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja.

"Kemarin saya di dapil, ada 650 karyawan salah satunya perusahaan pabrik gula yang datang ke saya. Mereka pekerja kontrak *outsourcing* yang dikerjakan pada pihak ketiga. Kawan-kawan ini belum mendapatkan hak-haknya," katanya.

Ia menjelaskan sejumlah karyawan ini tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, para karyawan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tempat perusahaan *outsourcing*. Namun, sudah beberapa tahun saldo mereka tidak berubah sampai hari ini.

"Kok bisa seperti ini terjadi? gimana pengawasannya? Pengawasannya ada dimana?," tanya politisi F- Nasdem. Tugas Dewas itu penting terutama sebagai mata dan

telinga DPR RI terkait kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Irma meminta kepada Dewas untuk membenahi kasus ini yang terjadi juga hampir di seluruh daerah Indonesia.

"Jadi tolong ini segera dibereskan, karena saldo mereka itu tidak berubah-ubah dan itu tidak hanya di satu Kabupaten saja. Saya tidak mau ini jadi modus, saya kira itu perlu jadi perhatian Dewas untuk disampaikan pada manajemen BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat kerja ini Dewas BPJS Ketenagakerjaan diantaranya Ketua Dewas Guntur Witjaksono, serta beberapa anggota seperti Syafri Adnan Baharuddin dan Rekson Silaban. ■

aparat dalam kejahatan narkoba untuk jangan ragu-ragu memberikan informasi tersebut kepada kami," terang politisi Golkar ini.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Bali Sugeng Priyanto menegaskan bahwa Polri sangat konsen dalam pemberantasan narkoba karena masuk dalam kejahatan luar biasa.

"Kita tidak segan langsung mencopot aparat yang terbukti bermain dalam kasus narkoba," tegas Sugeng meyakinkan. Lulusan Akpol 1983 dan berpengalaman dalam bidang reserse ini secara tegas tak ada kompromi terhadap siapapun terkait kejahatan narkoba sebagai *extraordinary crime*.

"Polri perlu masukan dari masyarakat untuk suplai informasi apapun terkait narkoba, pasti akan kami tindak lanjuti," janji orang nomor satu Polda Bali yang pernah menjabat Kadivhubinter Polri tahun 2013 silam.

Sementara itu perwakilan LSM Forum Bela Negara mengusulkan agar aksi pencegahan narkoba melibatkan guru BP (Bimbingan Pelajar) dalam pencegahan di sekolah.

"Upaya pencegahan juga bisa dilakukan dengan ketentuan surat bebas narkoba dari SMP ke SMA, SMA ke Perguruan Tinggi dan seterusnya. Namun pengawasan keluarga itu lebih utama," ujar perwakilan Forum Bela Negara.

Perwakilan LSM Pemberdayaan Perempuan menyatakan bahwa faktor ekonomi, gaya hidup berlebihan serta suami yang tidak mampu mencukupi secara ekonomi kerap menjadi alasan beberapa pihak terperangkap dalam jaringan kejahatan narkoba.

"Dibuatkan tempat rehabilitasi yang lebih layak dan jangan sampai tahanan pemakai digabung dengan pengedar, karena malah jadi pinter banyak belajar seluk-beluk bisnis narkoba," pungkas perwakilan Pemberdayaan Perempuan. ■

Revisi UU PIHU Tekankan Substansi Keagamaan

Ketua Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dalam rangka menghimpun masukan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PIHU) ke Provinsi Sulawesi Selatan, Ali Taher mengatakan ibadah haji tidak hanya soal penyelenggaraannya saja tetapi juga menyangkut substansi keagamaan yang perlu didorong.

Oleh karena itu, Komisi VIII ingin memperoleh rekomendasi usulan secara akademik yang ada di UIN Makassar. "Untuk dapat masukan itu diperlukan rekomendasi usulan secara akademik yang ada di Sulsel," ujar Ali Taher saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Rektor UIN Makassar dan Kakanwil Kementerian Agama Sulsel, Jumat (7/10).

"Kenapa Sulsel yang dipilih karena disini banyak pakar, pemerhati dan suasananya religius untuk didengarkan agar muatan RUU bisa mewakili aspirasi masyarakat," sambungnya.

Dalam revisi UU tersebut, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya menekankan aspek penyelenggaraannya



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher

saja, tetapi juga soal substansi keagamaan yang penting dilakukan. "Mudah-mudahan ibadah haji tidak hanya soal penyelenggaraan saja, tapi juga substansi keagamaan penting dilakukan," tuturnya.

Politisi PAN ini juga menyoroti aspek kesehatan dalam ibadah haji, ia menyarankan agar dalam penyuluhan keagamaan penting dilakukan sosialisasi bahwa jalan kaki itu penting. Karena peserta ibadah akan menempuh jalan kaki sejauh 5-7 km. Pulang pergi sudah 14 kilometer. Ini memerlukan sosialisasi.

Dalam kunspeknya tersebut, Politisi dapil Banten III ini menegaskan agar RUU ini bisa memberikan kepastian agar jemaah haji yang mendaftar dapat berangkat sesuai

dengan waktu yang telah dijadwalkan. "RUU PIHU ini bisa memberikan kepastian agar jemaah yang mendaftar sesuai dengan haknya dapat berangkat sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan," tegasnya.

Mengenai daftar antrian, Ketua Komisi VIII ini juga menegaskan secara bertahap akan dikurangi. Penting juga dilakukan pengurangan jumlah umur menjadi 65 tahun. "Terutama juga *waiting list* yang terlalu lama secara bertahap akan dikurangi. Terutama kita mengurangi jumlah angka umur. Yang berangkat jangan sampai 70 tahun tapi 65 tahun," ujar Ali Taher.

Selain Ali Taher (F-PAN) selaku Ketua Tim, Kunspek ke Sulsel ini juga diikuti Samsu Niang (F-PDIP), Wenny Haryanto (F-Golkar), Ruskati Ali Baal (F-Gerindra), Maman Imanul Haq (F-PKB) dan Ahmad Mustaqim (F-PPP). ■

(b.s.m.p), Foto: Hendra/jk

Lembaga Penyelenggara Haji Mendesak Dibentuk

Komisi VIII DPR RI sudah lama mendesak pemerintah membentuk badan penyelenggara haji yang independen, lepas dari Kemenag. Badan ini kelak bertanggung jawab langsung kepada Presiden atas semua penyelenggaraan haji.

Demikian mengemuka dalam diskusi Forum Legislasi yang membincang RUU Haji di Media Center DPR RI, Selasa (11/10). Hadir sebagai pembicara dua Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq, Khatibul Umam Wiranu, dan Abdul Khaliq Ahmad (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia).

Maman mengungkapkan, masyarakat dan para akademisi juga menyuarakan agar pemerintah segera membentuk badan independen yang mengurus haji dan umroh. Kemenag tak perlu lagi terlibat dalam urusan ini. Politisi PKB itu juga menambahkan, UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan



Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq (kiri) dan Khatibul Umam Wiranu (kanan) dalam acara forum legislasi

Ibadah Haji sebenarnya sudah mengamanatkan pembentukan badan khusus penyelenggara haji, hanya saja pemerintah hingga kini belum menyetujuinya.

Kemenag, sambung Maman, memang tidak boleh bersikap hegemonik untuk urusan haji. Dana Abadi Umat (DAU) yang begitu besar dari setoran haji, butuh pengelolaan yang profesional. Berapa banyak pejabat Kemenag yang terjerembab dalam kasus korupsi dana haji. Berkaca pada banyak kasus dan pengelolaan ibadah haji, maka pembentukan badan penyelenggara haji yang independen jadi keniscayaan.

Sementara Khatibul Umam menyampaikan, masalah penyelenggaraan haji sebenarnya mulai banyak muncul ketika tahun 2004. Ketika itu, perbankan

ikut terlibat dalam menentukan keberangkatan haji, karena biaya haji masyarakat disetor langsung ke bank. Berbeda pada era sebelumnya, calon Jemaah daftar ke Kemenag. Bila sudah lunas, Kemenag baru menyetorkan dananya ke bank. "Jadi ada komersialisasi haji," ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

Diakui pula oleh Khatibul, manajemen keuangan haji selalu bermasalah dari tahun ke tahun. Bahkan, audit keuangan haji tidak pernah mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ia

juga menyerukan, sudah saatnya pemerintah merespon desakan pembentukan badan independen penyelenggara haji.

Sebelumnya, Abdul Khalik berpendapat, Kemenag memang tak perlu banyak lagi terlibat dalam pengelolaan haji. Urusan ini harus dikelola dengan manajemen *modern* oleh lembaga independen yang khusus menyelenggarakan haji. "Jadi lembaga pemerintah non kementerian di bawah presiden langsung. Dia juga bukan lembaga

swasta. Dengan lembaga independen ini akan menyehatkan penyelenggaraan haji," ungkap Khalik.

Khalik menambahkan, setidaknya ada Rp 90 triliun dana haji yang harus dikelola. Tentu ini butuh pengelolaan tersendiri, agar Kemenag tidak terus menerus terjebak dalam lingkaran korupsi dana haji. Dan revisi UU haji yang sedang dilakukan Komisi VIII diharapkan memunculkan UU induk di bidang pengelolaan haji. UU turunannya kelak mengatur aset haji, keuangan haji, dan lain-lain. ■

(mb), Foto: Rami/fk

Komisi VI Pertimbangkan Untung Rugi dari Perjanjian Perdagangan Internasional

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) membahas soal dampak perjanjian perdagangan internasional pada sektor jasa bangunan dan perdagangan alat kesehatan.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana, dalam rapat ditanyakan tentang konsekuensi dari perjanjian internasional. Apakah bisa berdampak buruk atau baik dalam sektor perdagangan dan layanan jasa konstruksi bagi kepentingan nasional. Dengan mendapatkan masukan dari LPJK dan GPFI Komisi VI nantinya bisa mempertimbangkan untung rugi bagi perekonomian nasional.

"Kami mintakan masukan terkait perjanjian-perjanjian ini yang menyangkut masalah jasa, kemudian barang perdagangan. Apakah ini akan berdampak luas atau tidak, apakah ini akan berdampak pada perusahaan farmasi di Indonesia terkait barang-barang farmasi," tanya Azam saat memimpin rapat di Ruang Sidang Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (11/10).

Komisi VI ingin meninjau kembali perjanjian perdagangan internasional yang tertulis dalam enam surat dari Presiden RI Joko Widodo. Pihaknya ingin mempertimbangkan rencana tersebut dengan mendengar masukan dari LPJK dan GPFI.

Azam meminta kepada dua lembaga terkait untuk menyampaikan hal penting yang perlu diketahui Komisi VI DPR RI sebagai mitra dan pengawas pemerintah.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana bersama Ketua LPJK

Sebelum ditetapkan aturan tentang perjanjian perdagangan internasional.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kami mintakan tanggapan kepada pimpinan, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atas apa yang akan dilakukan pemerintah dalam ratifikasi," papar Azam.

Menurut Azam, dalam hal perjanjian perdagangan internasional yang menimbulkan akibat luas yang mendasar dalam kehidupan rakyat, serta terkait dengan keuangan negara, DPR RI memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan bahkan berwenang mengesahkan atau sebaliknya.

"Perjanjian internasional yang dapat

membahayakan kepentingan nasional Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak atau setuju dengan perjanjian perdagangan internasional tersebut," ungkap Azam.

Menanggapi permintaan Komisi VI, Ketua LPJK Nasional Tri Widjajanto W menyinggung tentang masuknya tenaga terampil asing, menurutnya hal itu tidak boleh, karena secara aturan yang berlaku dilarang. Untuk mengutamakan tenaga kerja lokal, guna mengurangi angka pengangguran nasional.

"Kita tidak membutuhkan tenaga terampil masuk Indonesia, secara regulasi itu tidak diperbolehkan," ungkap Widjajanto.

Sementara itu Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Darodjatun Sanusi meminta pemerintah bersama DPR RI mengawasi perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia karena adanya perjanjian ini. Menurutnya, banyak perusahaan asing yang ingin masuk ke Indonesia, namun hanya beroperasi lewat *online*. Darodjatun menegaskan, hal ini hanya akan merepotkan negara.

"Tolong betul diperhatikan keamanan berusaha. Utamakan kepentingan untuk memperoleh kesempatan di negara sendiri. Kita ada kesempatan kemandirian di sini," kata Darodjatun. ■

(do), Foto: Rami/fk

Anggaran Parlemen Harus Independen

DPR RI sudah sejak lama mengusulkan agar alokasi anggaran untuk legislatif dikelola secara mandiri dan independen, terpisah dari eksekutif. Wacana ini terus disuarakan oleh DPR RI, terutama lewat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI kepada publik.

Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan hal ini usai melakukan pertemuan sosialisasi rencana strategis (Renstra) DPR RI di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (6/10). "Anggaran parlemen di banyak negara terpisah dari anggaran eksekutif. Kami harus punya anggaran sendiri dan kami kelola sendiri. Tapi, tetap ada laporan yang transparan. Nanti kami buat bagaimana sistemnya, karena kami lembaga yang unik dan berbeda dengan eksekutif," ucapnya.

Menurut Agung, sebagai lembaga legislatif, DPR RI punya karakter yang berbeda dengan eksekutif. DPR RI merupakan lembaga politik yang sangat dinamis. Adalah ironis, ketika DPR RI mengawasi kinerja keuangan pemerintah, tapi anggaran lembaganya sendiri diatur pemerintah. Ditambahkan politisi Partai Demokrat ini, independensi DPR RI juga harus diterapkan pada sistem kepegawaian.

"Sistem kepegawaian juga harus independen. Di beberapa negara, pegawai parlemen itu terpisah dari pegawai eksekutif. Kami ingin betul-betul mandiri. Yang dinamakan kemandirian anggaran dan kepegawaian itu sekarang tidak ada. Hanya ada kemandirian perencanaan. Penggunaan dan pelaporannya kami masih disetir oleh eksekutif," ungkap Agung lebih lanjut.

Pada bagian lain, Anggota Komisi V DPR RI ini, menyampaikan citra buruk yang kerap dilontarkan masyarakat terhadap DPR RI. Selama ini, sambung Agung, masyarakat hanya mendapat informasi negatif dari media massa. Sisi positifnya tak pernah terpublikasi dengan baik kepada masyarakat luas. DPR RI hanya terbantu oleh media internalnya untuk menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan.

"BURT berperan menyusun strategi pencitraan. Kami dibantu oleh kehumasan DPR RI untuk menyampaikan apa yang kami perbuat. Yang jelek katakan jelek, yang bagus katakan bagus. Kami juga tidak



Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso

ingin dikasih 'bedak gincu' supaya cakep. Kami ingin apa yang dikerjakan sekarang ini tersampaikan kepada rakyat dan rakyat melihat kerja kami. Kami sangat terbantu

dengan TV Parlemen dan Parlementaria yang selalu menyampaikan hasil-hasil rapat di setiap komisi," ujar Agung.

Dikatakan Agung, ketika para Anggota Dewan rapat merumuskan kebijakan hingga pukul 02.00 dini hari, tak ada media yang memberitakan. Hanya TV Parlemen dan Parlementaria yang setia meliput hingga rapat selesai. "Selama ini yang jelek-jelek saja yang disorot. Inilah yang membuat persepsi masyarakat sangat buruk pada DPR RI. Jangan *bad news is good news* dijadikan pedoman," seru Agung.

Sementara itu, Agung sendiri memimpin langsung delegasi BURT untuk melakukan sosialisasi Renstra DPR RI kepada jajaran Pemprov Jatim, para akademisi, dan sekretariat DPRD setempat. BURT menyampaikan hasil-hasil kinerja selama setahun sekaligus rencana strategi ke depan. Pertemuan ini juga, tutur Agung, ingin menyerap perspektif lebih konkrit dan tajam dari publik untuk mengevaluasi Renstra dan memberi masukan untuk Renstra berikutnya. ■

(mb), Foto: Haevijk

Banggar DPR Setujui Anggaran Non Migas dan Non Energi

Badan Anggaran DPR RI menyetujui Rancangan APBN 2017 di sektor non migas sebesar Rp 79,4 triliun, dari usulan semula Rp 82,7 triliun, yang terdiri dari subsidi pangan, benih, pupuk, *public service obligation* (PSO), bunga kredit program, dan pajak. Subsidi pangan yang diajukan pemerintah sebesar Rp19,8 triliun dalam R-APBN 2017 juga disetujui Banggar.

Subsidi pangan tersebut digunakan untuk meningkatkan akurasi sasaran rumah dengan didukung akuntabilitas pengolahan dan alokasi anggaran dengan parameter Rumah Tangga Sasaran (RTS) 14,3 juta dan harga jual Rp1.600 per kilogram (kg), jelas Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir di Ruang Sidang Banggar, Nusantara II.

"Kalau ada yang ingin membahas mekanismenya bagaimana nanti dibahas di komisinya masing-masing. Bagaimana, setuju ya?" ujar Kahar yang memimpin sidang, Rabu (12/10).

Penetapan subsidi non migas sebesar Rp 79,4 triliun ini seiring dengan pemangkasan terhadap subsidi pupuk sebesar Rp 3,26 triliun, atau setara volume satu juta ton, dikarenakan pelaksanaan tahun lalu yang dinilai tidak tepat sasaran. Subsidi pupuk yang disetujui Banggar

DPR RI Soroti Klaim Asuransi TKI Yang Belum Dibayar

Komisi IX DPR RI meminta penjelasan perusahaan asuransi yang menaungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena pihaknya mendapat laporan banyak TKI khususnya di Bin Laden yang di Putus Hubungan Kerja belum menerima haknya.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengatakan sulitnya asuransi yang menaungi TKI melakukan klaim dikarenakan beberapa faktor, antara lain adalah pendataan yang kurang maksimal, tidak adanya perwakilan Indonesia di luar negeri sehingga klaimnya sulit di *follow up*.

"Oleh karena itu kami berharap negara memiliki sebuah konsep untuk melindungi

TKI dengan Jaminan Sosial Nasional.

Misalnya bisa saja JSN bekerjasama dengan konsorsium, dimana konsorsium itu harus memiliki perwakilan di luar negeri. Tujuannya agar manfaat

asuransi ini bisa di rasakan," ujarnya di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10).

Politisi Demokrat ini menjelaskan, pihaknya memperjuangkan asuransi ini karena tidak mau TKI hanya menjadi objek keuntungan pihak ketiga saja. Dia minta negara yang harus mengawal melalui badan yang dibentuk.

"Fokus menyelesaikan RUU PPLIN di dalamnya juga kita berbicara tentang asuransi. Apa yang harus dilakukan negara. Selain itu kita juga mendorong dengan membuat Panja BPJS ketenagakerjaan," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani yang mengatakan Komisi IX memanggil tiga konsorsium karena banyaknya klaim asuransi yang tidak terselesaikan akibat prosedur klaim yang tidak memenuhi syarat.

"Bagaimana mau memenuhi syarat, kalau TKI sendiri tidak tahu, tidak ada sosialisasinya dan bagaimana kawan-kawan TKI mau mengajukan klaim dengan

mudah dan asuransi ini bermanfaat baik untuk TKI kalau 3 asuransi yang menaungi ini tidak memiliki perwakilan di luar negeri," katanya.

Politisi Fraksi Nasdem ini juga mempertanyakan manfaat dari uang Rp 400 ribu yang di bayarkan setiap TKI untuk asuransi, karena dirinya banyak mendapat laporan dari TKI yang belum mendapatkan manfaatnya. Belum lagi tidak tercovernya asuransi Indonesia di luar negeri.

"Para TKI ini sudah di *cover* asuransi di negaranya bekerja, jadi kan ini *double* klaim. Menurut saya untuk apa ada klaim Indonesia kalau sulit dimanfaatkan oleh TKI kita. Hal-hal seperti inilah yang menurut saya, asuransi tenaga kerja yang dikelola 3 konsorsium tidak bermanfaat. Tutup saja karena perlindungan tenaga kerja diluar negeri itu yang bisa melindungi hanya Kemenlu, kembalikan ke Kemenlu biar dia yang handel dibawah pemerintah, sehingga kalau terjadi permasalahan kita bisa tunjuk hidung," pungkasnya. ■



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf

saat ini sebesar Rp 31,2 triliun untuk volume bersubsidi 9,55 juta ton.

"Kebijakan subsidi pupuk sebesar Rp 31,2 triliun untuk mendukung produktivitas pertanian volume pupuk bersubsidi 9,55 juta ton," jelas Kahar. Namun, Banggar DPR masih ingin melihat rencana detail pendistribusian subsidi pupuk tersebut.

"Intinya agar sasaran tepat. Kita minta pemerintah menyiapkan pendataan. Sambil tunggu itu, kita beri subsidi sementara dari 9,55 juta ton jadi 8,5 juta ton. Sisanya (1 juta ton) dicadangkan (untuk APBN-P 2017)," papar Kahar.

Selain itu, rapat Banggar kemarin juga menyetujui subsidi non energi untuk benih dalam R-APBN 2017 sebesar Rp 1,3 triliun dengan volume benih bersubsidi 116.500 ton, meliputi subsidi padi dan kedelai. "Untuk subsidi benih, apakah ada yang mau mengomentari. Jika tidak, ini kita setuju ya," kata Kahar.

Kahar juga memaparkan, Banggar juga telah menyetujui anggaran untuk perbaikan layanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik sebesar Rp 4,8 triliun. Jumlah tersebut akan dibagi ke dalam sektor alat transportasi seperti angkutan penumpang kereta api, angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan penyediaan informasi publik.

Sedangkan subsidi untuk perbaikan layanan alat penumpang kereta api kepada PT KAI sebesar Rp 2,1 triliun. Hal itu ditujukan untuk perbaikan layanan umum, penugasan layanan jasa angkutan KA Ekonomi jarak jauh, KA Ekonomi jarak sedang, jarak dekat, KRD Ekonomi, KRL Ekonomi, KA Ekonomi angkutan Lebaran, serta KRL Commuterline Jabodetabek, tambah Kahar.

Adapun untuk subsidi perbaikan layanan jasa angkutan kapal laut kepada PT Pelni, Banggar menyetujui subsidi sebesar Rp2,1



Ketua Banggar Kahar Muzakir

triliun. Selain itu, Banggar DPR juga menyetujui subsidi sebesar Rp0,17 triliun bagi Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.

"Kalau ini untuk layanan informasi publik bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, rawan konflik, berupa teks foto, TV *feature*, TV *hardnews*, infografis, dan *photostory*," ungkap Kahar. ■

(rnm), Foto: Rizka/jk

(eko,mp) foto:ajay/jk

Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah menyinggung kondisi pelayanan publik di daerah perbatasan yang minim. Hal itu sering ditemui ketika melakukan kunjungan kerja ke dapilnya di Kalimantan Utara, meskipun begitu ia mengapresiasi kinerja Ombudsman untuk melakukan inisiasi dalam melakukan investigasi.

Hal itu diungkapkan dalam Rapat Kerja dengan Ombudsman RI pada Senin, (10/10) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai memaparkan hasil kinerja ORI selama ini dalam mengawasi pelayanan publik.

"Saya mengapresiasi inisiatif yang dilakukan ORI selama ini, termasuk investigasi atas inisiatif sendiri sebagai wujud melaksanakan amanat UU No 37 tahun 2008 tentang ORI," ujar Hetifah.

Dalam kesempatan tersebut, Politisi Golkar ini juga menyinggung perihal pelayanan di daerah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Menurutnya pelayanan publik di daerah perbatasan masih memprihatinkan, sebagai contoh pelayanan pembuatan kartu tanda



Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian

penduduk (KTP). "Pelayanan Publik di daerah perbatasan masih memprihatinkan," terang Hetifah.

"Disana warga kita kesulitan membuat

KTP. Mereka mendapat iming-iming dari negara Malaysia yang memudahkan mereka pembuat IC (KTP Malaysia). Pemegang IC Malaysia mendapat banyak kemudahan, bantuan-bantuan, fasilitas pengobatan dan lainnya," ujar Hetifah.

Sehingga hal administratif seperti ini patut menjadi perhatian pemerintah pusat, karena ini menyangkut perhatian yang layak dari negara kepada masyarakat di daerah perbatasan.

Tak hanya KTP, Hetifah juga menyoroti keberadaan Puskesmas di Kalimantan Utara yang tidak lengkap dengan fasilitas rawat inap. Ia pun mengharapkan ORI harus mampu menjawab tantangan pelayanan publik di daerah perbatasan. "ORI harus menjawab tantangan pelayanan publik di perbatasan," tutup Hetifah. ■

(16), Foto: Jeyati/ik

Setjen DPR Gelar Sosialisasi Jamkestama

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi prosedur pelayanan Jamkestama bagi staf administrasi Anggota DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).

"Hari ini kita menyelenggarakan sosialisasi bagaimana prosedur menggunakan Jamkestama. Tentunya orang yang pertama membantu Anggota Dewan adalah staf yang melekat dalam hal ini adalah staf administrasi anggota dewan," ungkap Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany.

Diungkapkan Win, sapaan akrab Sekjen DPR, saat ini sudah ada petugas Jamkestama Jasindo yang bertugas di Pelayanan Kesehatan (Yankes) DPR setiap harinya. Namun, langkah ini tetap diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada setiap staf administrasi anggota dewan supaya memahami langkah-langkah yang tepat, jika terjadi sesuatu.

"Masalahnya adalah anggota DPR ada 560 orang, kita tidak pernah tahu kapan kondisi kita sehat, kapan kita sakit.



Wakil BURT Agung Budi Santoso bersama Pejabat Setjen DPR RI

Terkadang anggota dewan itu tugasnya lebih berat, rapat sampai pagi hingga tengah malam, seringkali membuat kesehatan tidak terjaga. Nah, untuk itu yang memerlukan pelayanan Jamkestama tidak boleh panik, tetapi tahu harus kemana dan bagaimana," jelas Win.

Dalam sosialisasi tersebut, turut hadir Wakil Ketua Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso, ia

berpendangan kegiatan ini sangat diperlukan karena berdasarkan hasil evaluasi BURT seringkali pihaknya mendapatkan keluhan dan pertanyaan seputar Jaminan Kesehatan Jasindo dari rekanannya di DPR.

"Karena itulah kami menilai para staf wajib mengetahui apa saja jaminan atau hak-hak anggota DPR beserta keluarganya terhadap layanan asuransi kesehatan yang diberikan oleh Jasindo," tutur Agung Budi Santoso saat membuka acara sosialisasi tersebut.

Selain itu, politisi dari F-Demokrat itu meminta kepada Jasindo untuk menambah *Representatif Officer* (RO) di setiap kantor cabang sehingga mempermudah keluarga anggota yang ada di daerah pemilihan masing-masing untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan dan akses Jamkestama. ■

(16), Foto: Jeyati/ik

Komisi VIII Serap Aspirasi Masyarakat Medan untuk Revisi UU PIHU

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI menggelar pertemuan dengan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menyerap mengenai revisi RUU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) di Aula Kanwil Kemenag, Medan, Jumat (07/10).

Tim yang dipimpin Anggota Komisi VIII Asli Chaidir menyatakan sangat senang dengan adanya masukan dari berbagai elemen masyarakat mulai dari ormas, tokoh masyarakat Islam dan pemilik *tour and travel*. "Dengan adanya masukan-masukan dari segala elemen masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi revisi RUU PIHU tersebut," ujar Asli Chaidir.

Banyaknya peraturan yang perlu diperbaiki menjadi alasan mengapa Komisi VIII ingin merevisi RUU tersebut, "Karena masalah haji ini sangat kompleks dan banyak yang belum diatur oleh undang-undang. Untuk itu Komisi VIII bersama pemerintah akan merevisi UU ini agar berguna untuk jamaah demi



Anggota Komisi VIII DPR RI Asli Chaidir

kebaikan pelaksanaan haji," terang politisi PAN tersebut.

Ia berharap RUU ini akan mengatur penyelenggaraan haji secara komprehensif dan profesional mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal pengelolaan keuangan haji juga perlu dikaji agar jamaah haji merasakan kesejahteraan.

Nantinya RUU tersebut akan membedakan secara tegas siapa yang akan bertindak sebagai regulator atau pembentukan kebijakan mengenai haji dan umroh. Lalu juga siapa yang melaksanakan penyelenggaraan, pengawasan dan pengelolaan keuangan haji.

Dalam acara tersebut hadir pula Kakanwil Kemenag, Tohar Bayoangin. Beberapa anggota Komisi VIII yang ikut Kunspek adalah Agus Susanto dari Fraksi PDIP, An'im Falachuddin dari Fraksi PKB dan Samsudin Siregar dari Fraksi Hanura. ■

(Gey. mp). Foto: Jayati/jk

Amir Uskara Desak Pemerintah Kejar Pajak Google

Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara mendorong pemerintah untuk mengejar bukan hanya Google, tetapi juga perusahaan lain yang melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan untuk membayar pajak. Perusahaan jasa informasi ini banyak mendapatkan keuntungan sehingga tidak boleh tidak juga harus membayar pajaknya.

Diitemui sebelum Sidang Paripurna Rabu (12/10), politisi F-PPP ini menegaskan, siapapun melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan dari usahanya itu wajib bayar pajak. Kewajiban itu tidak hanya satu bidang usaha atau khusus bidang IT saja. "Saya anggap ini keteledoran pemerintah, maka segera dikejar untuk membayar kewajibannya," tandas politisi PPP ini.

Bahkan politisi yang duduk di Komisi XI (bidang keuangan dan perbankan) ini melihat dan terkesan ada pembiaran sehingga tidak terdeteksi berapa sebetulnya kewajiban pajak yang ditanggung Google. Menurut pemerintah yang harus

Google bayar 0,5 persen angka ini masih jauh sebab ada indikasi perusahaan ini punya hutang hingga Rp 5 Triliun, suatu jumlah yang sangat besar.

"Karena ini baru mencuat, maka akan saya kejar dan pertanyakan dengan Menteri Keuangan. Kebetulan sore ini ada Raker dengan Menkeu, maka akan saya tanyakan," ungkapnya.

Saat ditanyakan apakah perusahaan ini enggan membayar karena merasa diperlukan, menurut Amir Uskara tidak

demikian. Buktinya membayar pajak, cuma laporannya yang masuk dengan kondisi riil dengan laporan pemerintah jauh berbeda. "Sepertinya bayar tapi cara melaporkannya yang tidak jujur," tukas dia.

Terkait alasan keengganan belum bayar pajak, legislator ini mengatakan namanya usaha maka akan berusaha sebanyak-banyak meraih keuntungan dengan sedikit pengeluaran. Tapi dia yakin pemerintah bisa mendeteksi suatu yang wajar untuk dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan. ■



Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara

(mp). Foto: Azka/jk

Anggota DPR RI Kecewa Penolakan Asosiasi Perusahaan terhadap RUU TJSP

Anggota DPR RI Itet Tridjati Sumariyanto mengungkapkan rasa kecewanya dengan ada penolakan dari Asosiasi perusahaan dan pengusaha terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Dengan RUU TJSP diharapkan dapat lebih cepat mengentaskan kemiskinan.

Menurut Itet, dari sekian banyak perusahaan yang ada belum dapat mengentaskan kemiskinan. Tanggung jawab sosial bukan hanya pemerintah, tapi perusahaan juga memiliki peran tanggung jawab sosial.

"Saya kecewa ada penolakan dari Kadin, Apindo, dan Hipmi bahwa tidak perlu ada UU khusus tentang tanggung jawab sosial, dari sekian banyak perusahaan apakah sudah dapat mengentaskan kemiskinan, perusahaan-perusahaan ini jangan mengambil untungnya saja," katanya, saat Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (ASPINDO), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/10).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan masih lemah. "Komisi VIII ingin memperbaiki bukan membebani perusahaan, bagaimana mengawasinya dengan sekian banyak ini yang akan diatur," paparnya.

Sejalan dengan itu, Samsu Niang, mengatakan CSR dapat dimanfaatkan dalam mensejahterakan di lingkungan sekitar perusahaan. Kalau ini tidak tersosialisasikan dengan baik dikhawatirkan tidak akan ditepati lagi yang menjadi komitmen terhadap tanggung jawab sosial oleh perusahaan.

"Banyak perusahaan yang menghindari tanggung jawab sosial maka perlu dibuat UU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," ungkapnya.

Hal senada, disampaikan Desy Ratnasari dari Fraksi Partai Amanat Nasional, bahwa RUU ini diinisiasi dari pemikiran bahwa ingin melakukan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan secara masif diseluruh Indonesia, yang tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Hal ini juga



Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjati Sumariyanto

menjadi tanggung jawab seluruh *stakeholder* yang ada.

"Komisi VIII melihat tidak dilakukan secara optimal oleh para pengusaha dan perusahaan yang ada di daerah seluruh Indonesia. Akhirnya DPR RI menginginkan lahirnya UU TJSP ini," katanya.

Menurutnya, sebaiknya ada pengaturan pelaporan kinerja perusahaan, sejauh mana perusahaan tidak merasa tidak ada pihak yang ikut mencampuri manajemen perusahaan, Pihaknya memiliki tanggung jawab menyampaikan sebuah peringatan kesadaran sosial dari masing-masing perusahaan. "Jika ada kesadaran dari masing-masing perusahaan mungkin RUU ini tidak akan lahir. Tapi ternyata ada yang belum maksimal maka RUU tercetus," katanya.

Dia menambahkan, RUU TJSP lahir sebagai sebuah integrasi seluruh UU yang telah ada guna melahirkan program-program untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mendorong tumbuhan perekonomian.

Patut diketahui, pernyataan Apindo yang disepakati Hipmi dan Kadin menyatakan bahwa tidak diperlukan UU Khusus mengatur

tentang TJS, namun diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan aturan-aturan TJS Perusahaan sudah terintegrasi dalam berbagai UU yang ada yang telah mencakup upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Saat ini setidaknya ada 11 UU yang berlaku di Indonesia yang telah memuat pengaturan terkait TJS Perusahaan. Penambahan regulasi baru yakni RUU TJSP tidak menjamin pelaksanaan TJS seluruh organisasi akan lebih baik ke depannya. Yang dibutuhkan yakni pengawasan terhadap implemmentasi regulasi yang ada, bukan penambahan regulasi baru. ■

(as), Foto: Juhar/ik

Komisi VIII Himpun Masukan Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Komisi VIII DPR RI Jumat (7/10) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Universitas Islam Negeri (UIN) Malang untuk mencari dan menampung masukan untuk pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. RUU ini digagas sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 2008 untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di tahun-tahun berikutnya.

Legislator Desak ORI lakukan Manajemen Berbasis IT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dalam rapat kerja dengan Ombudsman RI menyarankan agar ORI menggunakan sistem manajemen berbasis *Information Technology* (IT) dalam menjalankan tugas-tugasnya yang semakin berat dengan ruang lingkup kerja yang luas.

Saya desak ORI melakukan sistem manajemen berdasarkan IT," ujar Lukman, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (10/10).

Hal itu didasarkan pada lingkup tugas yang luas, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang cukup luas. Sehingga membutuhkan manajemen yang kuat agar dapat memperoleh hasil kerja yang baik pula.

"Dengan lingkup



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy

tugas yang luas dan besarnya NKRI kalau tidak segera membangun sistem manajemen berbasis IT maka saya pesimis ORI bisa memperoleh hasil kerja yang baik pula," ujar Politisi PKB ini.

Dengan sistem manajemen berbasis IT, diharapkan ORI mampu menjadi lebih kuat dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan rekomendasi yang diberikan ORI menjadi lebih akurat.

Selain itu,

dengan manajemen berbasis IT, ORI dapat melakukan publikasi terhadap hasil audit soal praktek mal administrasi di beberapa lembaga negara. Hal ini penting dalam upaya pengawasan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Untuk itu diperlukan keberanian dari ORI untuk mempublikasi-kannya. Sehingga tidak ada lembaga yang tidak diawasi oleh publik. "Hasil audit harus dirilis soal praktek mal administrasi. Harus ada keberanian untuk merilis. Jadi tidak ada yang tidak diawasi, semua harus diawasi," tutur Lukman.■

(b), Foto: Inyati/fk

Kunspek dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid. Dia menyebutkan, ada beberapa hal krusial yang menjadi poin pembahasan dalam RUU ini.

"Salah satu poin yang akan dibahas adalah badan khusus di luar pemerintahan yang mengurus masalah penyelenggaraan ibadah haji dan umroh," kata Sodik Mujahid saat kunjungan ke UIN Malang.

Sodik Mujahid juga menyayangkan pemerintah yang belum sepekat untuk dilakukan revisi undang - undang tersebut. "Kalaupun pemerintah tidak ada itikad baik untuk melakukan revisi UU tersebut, terpaksa akan dibicarakan di paripurna. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ungkapnya.

Kemenag sendiri menyatakan setuju dengan pembahasan lebih lanjut soal RUU ini. Tapi untuk pembahasan Badan tersendiri yang khusus mengurus soal

penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pihak Kemenag tidak sepeham dengan Komisi VIII DPR RI.

"Dari sisi regulasinya setingkat UU tentu harus disesuaikan. Banyak titik-titik persamaan antara DPR RI dengan pemerintah

karena memang semangatnya sama. Tetapi juga ada hal-hal yang perlu didiskusikan kembali karena masih ada cara pandang yang berbeda dalam dua isu utama. Pertama adalah yang terkait dengan badan penyelenggara haji sendiri dan yang kedua adalah badan pengawasnya. Ini yang tentu nanti akan dialami dalam Panja," papar Sodik.

"Yang diinisiasi oleh DPR RI diusulkan agar penyelenggaraan ibadah haji ini dilakukan oleh badan penyelenggaraan tersendiri di luar



Tim Kunspek Panja Haji Komisi VIII DPR RI mengunjungi UIN Malang

pemerintah. Yang di mata pemerintah ini adalah usulan yang betul-betul harus dicermati. Karena pemerintah berpandangan bahwa sejak dulu kalau haji itu merupakan tugas nasional di mana tanggung jawabnya itu ada di tangan pemerintah," jelasnya.

Ikut serta dalam Kunspek ini Hamka Haq anggota fraksi PDIP, Kuswiyanto anggota fraksi PAN, Choirul Muna anggota fraksi Nasdem, dan M Iqbal Romzi anggota fraksi PKS.■

(andri,mp), Foto: Andri/fk

BKSAP Terima Kunjungan Parlemen Jerman

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menerima kunjungan anggota Bundestag (parlemen) Jerman Thomas Gambke beserta delegasi parlemen Jerman lainnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/10). Pertemuan yang berlangsung alot tersebut mendiskusikan peran legislatif di kedua negara.

“ Mereka tadi menanyakan bagaimana peran DPR RI dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah, ini menarik sekali. Mereka juga ingin tahu apakah DPR RI dilengkapi staf ahli, karena bagi mereka itu penting dalam mendukung kinerja anggota DPR RI,” ungkap Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf.



Suasana pertemuan Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dengan Parlemen Jerman

Sebelumnya, BKSAP telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan 49 parlemen negara sahabat untuk mendorong peningkatan hubungan persahabatan dan kerja sama di berbagai bidang melalui parlemen.

Selain diskusi tentang pemerintahan, BKSAP juga membicarakan kesamaan kedua negara. Menurut politisi F-Demokrat itu Indonesia dan Jerman memiliki banyak kesamaan. Kedua negara merupakan negara demokratis dan negara dengan perekonomian terbesar di regional masing-masing, Uni Eropa dan Asean.

Namun disayangkan, neraca perdagangan antar kedua negara mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada

tahun 2012, neraca perdagangan terdapat US\$7,2 miliar dan terus mengalami penurunan hingga US\$6,1 miliar pada tahun 2015.

Ia menilai, Indonesia memiliki peranan penting sebagai negara yang berkontribusi 35 persen terhadap perekonomian ASEAN. “Kami berharap kita dapat lebih meningkatkan kerja sama, mengingat kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih,” lanjutnya.

Namun hingga saat ini, DPR RI dan Bundestag belum memiliki GKSB.

Untuk itu, BKSAP mendorong pembentukan GKSB ke depan. “Mereka akan membentuk sedikit grup tidak terlalu besar, 4-5 orang untuk setiap negara, kita sudah bahas tadi dan tentunya semua ini untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan Jerman,” tandas Nurhayati. ■

(ans.np), Foto: Juyadi/fk

Irtama DPR RI dan BPKP Sosialisasikan SPIP

Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat Jendral DPR RI bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh Kasubag dan Kabag Sekjen DPR RI. Sosialisasi ini merupakan implementasi dari PP No. 60 Tahun 2008.

“ Regulasi PP No. 60 Tahun 2008 mengharuskan masing-masing lembaga melaksanakan Sistem Pengendalian Intern. Makanya kami sosialisasikan kembali, karena ditargetkan pada tahun 2019 semua penyelenggara kenegaraan harus berada pada level tiga,” ujar Kepala Irtama DPR RI Setyanta Nugraha di Gedung DPR RI,

Senayan, Jakarta, Selasa (11/10).

Setyanta menjelaskan, Sosialisasi SPIP ini perlu dilakukan karena berdasarkan *survey* yang dilakukan BPKP, sebagian besar kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah masih berada di level satu termasuk Setjen DPR RI.

“Ini langkah yang perlu di lakukan, karena ini merupakan domain dari manajemen untuk menerapkan SPIP dan ini meliputi beberapa hal instrumen yang harus dilakukan untuk mencapai level 3 di tahun 2019, yaitu melalui penyusunan berbagai instrumen, nanti bentuknya regulasi, pedoman atau SOP belum tahu, yang penting betul-betul dapat mengimplementasikan SPIP,” katanya.

Dengan SPIP ini pula, nantinya semua bagian

Komisi VI Tekankan Posisi PTSP Harus Didongkrak

Sebanyak 16 Anggota Komisi VI DPR RI melakukan pengawasan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Inspeksi ini untuk mengetahui jalannya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VI Teguh Juwarno.

Menurut Teguh, posisi Indonesia saat ini berada di tingkat 108 dari 189 negara dalam urusan kemudahan berusaha. Posisi jeblok tersebut menurutnya sangat memprihatinkan, sehingga Komisi VI sangat berkepentingan untuk mendongkrak dari posisi bawah bisa menjadi lebih baik, mengalami kemajuan layanan berusaha secara positif.

"Apa yang ingin kita tekankan bahwa pelayanan satu pintu ini adalah etalasnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan ini, jangan lagi kita di urutan 108," harap Teguh di Kantor BKPM, Senin (10/10).

Menurut Teguh saat ini ada tiga hal utama yang menjadi persoalan dalam pelayanan penanaman modal, pertama problem soal pajak, kedua peraturan yang berubah-ubah dan yang ketiga yang tidak kalah penting menurutnya adalah persoalan praktik di daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan yang ada di pusat.

Teguh beralasan menurut temuan di lapangan ada praktik-praktik di daerah yang kontra dengan kebijakan yang ada di pusat. Tentunya hal tersebut bisa menghambat pembangunan nasional. Tiga hal tersebut Teguh paparkan menurut pengakuan para investor. "Ini semua yang harus kita bedah bersama untuk kemudian kita perbaiki," ujar Teguh.

Menurut penilaian Teguh adanya pelayanan satu pintu merupakan salah satu bentuk dari pengkoordinasian, diharapkan pemerintah daerah bisa menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Karena daerah perlu mensinergikan dengan kebijakan yang ada di pusat, guna pembangunan nasional yang progresif.

"Di negeri ini koordinasi adalah sesuatu yang sulit, maka ini hanya bisa dengan kepemimpinan yang

dengan target yang telah ditetapkan," katanya.

Setyanta juga mengatakan selama ini pemahaman pengendalian yang diketahui unit yang ada di Setjen DPR RI seolah-olah pengawasan internalnya hanya dilakukan Irtama, makanya SPIP ini di sosialisasikan lagi karena sistem pengawasan internal harus berawal dari masing-masing tatarannya bagian.

"Harus dilakukan oleh Kabag dulu kemudian Kabiro, Deputy sampai Sekjen dengan tahap pertama dan kedua, kemudian ada tahap ketiga, dan terakhir di inspektorat utama. Jadi semua masalah itu tidak bisa langsung diserahkan ke Irtama tetapi harus dikendalikan oleh masing-masing Kabag, Kasubag dan Kabiro dan Setjen," pungkasnya. ■



Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno bersama Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong

kuat, dan menurut saya pak Jokowi sudah menunjukkan itu. Pola-pola layanan satu pintu ini di daerah juga harus kita kembangkan. Antara pusat dan daerah ini kita *linkkan* secara *online*," jelas Teguh.

Teguh juga memberi penilaian, selama berjalannya pelayanan satu pintu sampai saat ini sudah banyak kemajuan, dan perbaikan. Salah satu indikasinya adalah koordinasi antar kementerian yang awalnya sulit sekarang sudah lebih baik.

"Sekarang tantangan berikutnya, menurunkan pola semacam ini ke daerah, itu yang menurut saya belum berhasil," kata Teguh.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, mengatakan PTSP akan selalu diimplementasikan dengan komitmen cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi. Dia juga mengungkapkan PTSP melayani 167 jenis perizinan dan non-perizinan penanaman modal, hal tersebut sesuai dengan pendelegasian dari kementerian teknis. ■



Inspektorat Utama DPR RI Setyanta Nugraha

dalam melakukan kegiatan harus melakukan yang namanya manajemen resiko. "Setiap kegiatan itu harus dipetakan resiko yang akan terjadi, sehingga bisa dilakukan mitigasi terhadap kejadian tersebut agar kegiatan itu diharapkan sesuai

(rmm), Foto: Azka/jk

(cbo.mp), Foto: Kumi/jk

Cabut Subsidi Listrik Pelanggan Rumah Tangga 900 VA Data Pemerintah Harus Akurat

Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha meminta pemerintah untuk benar-benar memperhatikan akurasi data-data pelanggan rumah tangga dengan beban listrik 900 VA. Hal ini menyusul rencana PLN mencabut subsidi bagi pelanggan rumah 900 VA yang dinilai tidak layak subsidi.



Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha

“Pemerintah berencana untuk mencabut subsidi kepada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 900 VA yang dinilai tidak layak diberikan subsidi. Karena menurut *survey* BPS dan verifikasi oleh PLN ada sekitar 18 juta dari 22 juta pelanggan 900 VA yang tidak layak menerima subsidi. Oleh karena itu PLN berencana mencabut subsidi tersebut. Dampaknya akan terjadi kenaikan tarif dasar listrik oleh masyarakat dengan daya 900 VA,” ungkap Satya ketika ditemui usai sidang paripurna DPR RI, Senayan Jakarta Rabu (12/10).

Pemerintah, lanjut Satya, mengaku

tidak sedikit menemukan pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 900 VA yang merupakan kelompok masyarakat cukup mampu. Namun tentunya hal tersebut harus didukung oleh data-data yang akurat dan proses verifikasi yang matang. Sehingga pencabutan subsidi yang dilakukan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Selain itu Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini meminta agar kenaikan Tarif dasar listrik (TDL) yang merupakan imbas dari pencabutan subsidi ini pembebanannya tidak memberatkan masyarakat secara langsung. Dengan kata lain, ia meminta jikapun TDL naik, kenaikannya dilakukan secara bertahap per tiga bulan alias tidak langsung.

"Jadi pencabutan subsidi ini tujuannya merubah paradigma subsidi harga yang selama ini diterapkan kepada beberapa komponen harga di masyarakat, menjadi subsidi langsung tunai ke rakyat. Misalnya subsidi untuk pendidikan dan subsidi sosial lainnya yang mekanismenya dengan berbagai cara. Hal serupa juga akan dilakukan pada bahan bakar, elpiji 3 kg yang juga akan dicabut subsidi, " pungkasnya. ■

(ayul) Foto: Jakafix

Legislator Dorong RS Pendidikan UIN Makassar Segera Terealisasi

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang dalam kunjungan kerja ke UIN Makassar menyatakan akan membantu peningkatan kualitas UIN. "Kami di Komisi VIII akan berjuang terus agar UIN Makassar menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional. Oleh karena itu Insya Allah dalam waktu dekat, Rumah Sakit Pendidikan yang ada di UIN ini akan terealisasi pembangunannya," ujarnya di sela-sela kunjungan ke kampus universitas tersebut Jumat (7/10).

Dengan adanya fasilitas RS Pendidikan, lanjut Samsu, maka pihaknya akan terus berjuang dan mendorong agar UIN Makassar mampu melahirkan dokter unggulan dan mampu berkompetisi dengan negara lain.

Dalam rangkaian kunspek ini terlontar adanya permintaan dari beberapa *civitas academica* mengenai realisasi RS Pendidikan di UIN Makassar. Legislator dapil Sulsel II ini menegaskan akan terus berjuang agar UIN Makassar mampu melahirkan



Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang

dokter unggulan dan kompetitif dengan negara lain, sehingga tidak hanya unggul dalam studi keislaman saja, tetapi juga bidang lain pelayanan masyarakat.

"Kami akan berjuang terus untuk bagaimana melahirkan dokter unggul dan kompetitif dengan negara lain," ujar Politisi PDIP ini.

Selain itu lanjut Samsu, harapannya dengan adanya RS Pendidikan ini UIN Makassar mampu menjadi perguruan tinggi islam yang tidak hanya kompetitif dalam studi keislaman saja, tetapi juga studi konvensional. Apalagi, kini UIN sudah bertransformasi menjadi kampus *universal*, sehingga pengembangan dalam berbagai sektor sangat diperlukan. ■

(somp) Foto: Hendraufik



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf bersama Dubes Yunani

Indonesia Bisa Belajar Sektor Pariwisata dari Yunani

Akhir Juli 2015, Yunani mengalami keterpurukan ekonomi dan tidak mampu membayar cicilan utang kepada IMF. Kala itu, berguncangnya ekonomi Yunani dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Di satu sisi, Yunani tetap memaksimalkan sektor pariwisata untuk mendapatkan penerimaan negara. Terkait hal itu, Indonesia bisa belajar dari Yunani.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Indonesia bisa belajar dari Yunani dalam meningkatkan sektor pariwisata. Apalagi, Indonesia memiliki potensi alam yang luar biasa, sehingga diharapkan menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.

"Kita sampaikan, kita ingin belajar sektor pariwisata dari Yunani, karena 50 persen penerimaan negaranya berasal dari pariwisata. Walaupun Yunani mengalami keterpurukan, masih bertahan menerima kunjungan wisatawan," kata Nurhayati, usai menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Georgios Dogoritis, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, dalam pertemuan itu juga ditekankan mengenai pentingnya menjaga lingkungan dalam mendukung sektor pariwisata. Pasalnya, dalam menarik minat kunjungan wisatawan, bukan hanya tentang keindahan alam, tapi juga lingkungan yang asri dan bersih.

Nurhayati memastikan, keterpurukan ekonomi Yunani juga bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia. Apalagi, Tanah Air pun

pernah mengalami krisis ekonomi. Indonesia bisa belajar dari Yunani, untuk bangkit dari keterpurukannya.

"Kita bisa belajar dari perekonomian Yunani yang pernah terpuruk. Apalagi kita juga pernah mengalami guncangan ekonomi. Kita mengambil manfaatnya untuk belajar, dan kita belajar bagaimana membantu mereka," kata Nurhayati.

Dalam kesempatan itu, dibahas juga mengenai upaya meningkatkan kerjasama kedua negara. Apalagi, dengan sudah adanya Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI antara Indonesia dengan Yunani. GKSB DPR RI pun sudah berkunjung ke Yunani pada Mei lalu.

"Tentunya hubungan kerjasama kedua negara ini penting untuk menjembatani antara Indonesia dengan Eropa, terkait ekspor untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Kita juga berharap, Indonesia sebagai negara terbesar di Asia, bisa menjembatani hubungan Yunani dengan Asia," jelas politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sementara itu, Dubes Yunani mengatakan, ke depannya akan datang delegasi Yunani ke Indonesia. Ia pun mengundang BKSAP DPR RI untuk berkunjung ke Yunani. ■

(g) Foto: Azka/fk

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri f DPR RI @DPR_RI DPR RI



Tim Komisi VI DPR RI melakukan inspeksi ke BKPM terkait kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Jakarta Selatan, Senin (10/10)
Foto : Runi

RDP Panja Pengawasan Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI dengan sejumlah Kapolda menerima masukan terkait terbitnya SP3 atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Selasa (11/10).
Foto: arief



Tim penyusun laporan kinerja DPR RI dipimpin Kepala Biro Pimpinan, berdiskusi dengan Civitas Akademika Unika Soegija Pranata dan Universitas Diponegoro, Semarang, dalam rangka memperoleh masukan (6-8/10) Foto: Tim